

**IMPLEMENTASI PARADIGMA FUNGSIONALISME DURKHEIM DALAM MATA
PELAJARAN PPKN KURIKULUM MERDEKA BERBASIS PEMBELAJARAN
MENDALAM (*DEEP LEARNING*)**

Esti Perwitasari¹, Sarmini²

^{1,2}PPKN FISIPOL Unesa

¹akil.esti@gmail.com, ²sarmini@unesa.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Émile Durkheim's functionalist paradigm in Pancasila and Civic Education (PPKn) within the Merdeka Curriculum through a deep learning-based approach. The functionalist paradigm views education as a social institution that plays a vital role in maintaining social order, fostering social integration, and preparing students to carry out their social responsibilities effectively in society, the nation, and the state. This study employs a qualitative approach through a literature review by examining various scholarly sources, educational policies, and relevant concepts related to PPKn, the Merdeka Curriculum, deep learning, and Durkheim's functionalist theory.

The findings indicate that the implementation of the functionalist paradigm in deep learning-based PPKn is reflected in learning processes that emphasize meaningful understanding, critical reflection, collaboration, and active student engagement in addressing real-life social issues. Learning activities are not merely oriented toward the acquisition of civic knowledge but also toward the internalization of Pancasila values, character development, social responsibility, and the formation of collective consciousness as citizens. Through the deep learning approach, students are encouraged to connect civic concepts with their everyday experiences, creating a learning process that is more relevant, contextual, and sustainable. This implementation is aligned with the objectives of the Merdeka Curriculum in developing the Pancasila Student Profile, characterized by faith and piety, critical reasoning, independence, creativity, mutual cooperation, and global diversity awareness.

Therefore, Durkheim's functionalist paradigm provides a strong theoretical foundation for the development of PPKn learning that strengthens social integration, fosters national character, and prepares young generations to become democratic, responsible, and adaptive citizens in responding to social change.

Keywords: *Durkheim's Functionalist Paradigm, Pancasila and Civic Education (PPKn), Merdeka Curriculum, Deep Learning, Pancasila Student Profile.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma fungsionalisme Émile Durkheim dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum Merdeka yang berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*). Paradigma fungsionalisme memandang pendidikan sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keteraturan, membangun integrasi sosial, serta menyiapkan peserta didik agar mampu menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, kebijakan pendidikan, serta konsep-konsep yang relevan mengenai PPKn, Kurikulum Merdeka, pembelajaran mendalam, dan teori fungsionalisme Durkheim. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi paradigma fungsionalisme dalam PPKn berbasis *deep learning* tercermin melalui proses pembelajaran yang menekankan pemahaman bermakna, refleksi kritis, kolaborasi, serta keterlibatan aktif

peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lingkungan sosialnya. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, penguatan karakter, pengembangan tanggung jawab sosial, serta pembentukan kesadaran kolektif sebagai warga negara. Melalui pendekatan *deep learning*, peserta didik didorong untuk menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari sehingga tercipta proses belajar yang lebih relevan, kontekstual, dan berkelanjutan. Implementasi tersebut sejalan dengan tujuan Kurikulum Merdeka dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, paradigma fungsionalisme Durkheim memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pengembangan pembelajaran PPKn yang mampu memperkuat integrasi sosial, membangun karakter kebangsaan, serta mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci: Paradigma Fungsionalisme Durkheim, PPKn, Kurikulum Merdeka, Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*), Profil Pelajar Pancasila.

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas individu sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan sosial. Selain berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga menjadi media penanaman nilai, norma, moral, dan karakter yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, berbagai tantangan masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia, seperti rendahnya tanggung jawab sosial peserta didik, meningkatnya kasus perundungan, intoleransi, serta belum optimalnya pembentukan karakter. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan perlu terus diperkuat agar mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme Émile Durkheim yang menempatkan pendidikan sebagai sarana sosialisasi nilai dan pembentukan kesadaran kolektif untuk menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks Indonesia, upaya meningkatkan kualitas pendidikan diwujudkan melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini juga mendorong penggunaan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang berfokus pada pemahaman bermakna, kesadaran belajar, dan pengalaman belajar yang menyenangkan. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah,

serta menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut karena berperan membentuk warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan berkarakter Pancasila. Akan tetapi, praktik pembelajaran PPKn di berbagai sekolah masih sering berorientasi pada hafalan dan penguasaan materi sehingga belum sepenuhnya mampu menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara mendalam. Akibatnya, peserta didik memahami konsep secara teoritis, tetapi belum optimal dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan pembelajaran mendalam dalam PPKn menjadi penting untuk membantu peserta didik memahami, merefleksikan, dan menginternalisasi nilai-nilai sosial serta kebangsaan secara lebih bermakna. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi paradigma fungsionalisme Durkheim dalam pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* pada Kurikulum Merdeka. Penelitian bertujuan mengkaji bagaimana fungsi pendidikan sebagai sarana sosialisasi, integrasi sosial, dan pembentukan karakter diwujudkan dalam proses pembelajaran PPKn, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung,

hambatan, dan kontribusinya terhadap pembentukan Profil Pelajar Pancasila.

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian sosiologi pendidikan, menjadi referensi bagi guru dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih bermakna, membantu sekolah meningkatkan kualitas implementasi Kurikulum Merdeka, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan penelitian pendidikan di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi paradigma fungsionalisme Émile Durkheim dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pengalaman, interaksi, serta proses pembelajaran yang berlangsung secara alami sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran dan kontribusinya terhadap pembentukan

karakter peserta didik serta Profil Pelajar Pancasila.

Penelitian dilaksanakan pada sekolah-sekolah negeri yang tergabung dalam MGMP PPKn Kota Surabaya dan telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan penerapan Kurikulum Merdeka, penggunaan perangkat pembelajaran yang sesuai, pelaksanaan pembelajaran mendalam, serta keberadaan program penguatan karakter dan Profil Pelajar Pancasila. Informan penelitian terdiri atas guru PPKn sebagai sumber data utama, peserta didik, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan kepala sekolah. Keempat kelompok informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pengelolaan pembelajaran PPKn di sekolah.

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu implementasi paradigma fungsionalisme Durkheim dalam pembelajaran PPKn, penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*), pembentukan karakter dan Profil Pelajar Pancasila, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta penerapan strategi *deep learning*. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, kebijakan, dan praktik pembelajaran, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis modul ajar, ATP, CP, LKPD, hasil proyek peserta didik, serta berbagai dokumen sekolah yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data. Untuk mendukung proses tersebut digunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga diperoleh temuan

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi waktu digunakan untuk memastikan konsistensi data pada waktu yang berbeda. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan. Melalui prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan data yang kredibel, konsisten, objektif, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai implementasi paradigma fungsionalisme Durkheim dalam pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* pada Kurikulum Merdeka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami

secara mendalam implementasi paradigma fungsionalisme Émile Durkheim dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum Merdeka berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, pengalaman, interaksi, serta proses pembelajaran yang berlangsung secara alami sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan pembelajaran dan kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik serta Profil Pelajar Pancasila.

Penelitian dilaksanakan pada sekolah-sekolah negeri yang tergabung dalam MGMP PPKn Kota Surabaya dan telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan penerapan Kurikulum Merdeka, penggunaan perangkat pembelajaran yang sesuai, pelaksanaan pembelajaran mendalam, serta keberadaan program penguatan karakter dan Profil Pelajar Pancasila. Informan penelitian terdiri atas guru PPKn sebagai sumber data utama, peserta didik, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan kepala sekolah. Keempat kelompok informan tersebut dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pengelolaan pembelajaran PPKn di sekolah.

Fokus penelitian diarahkan pada empat aspek utama, yaitu implementasi paradigma fungsionalisme Durkheim dalam pembelajaran PPKn, penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*), pembentukan karakter dan Profil Pelajar Pancasila, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati aktivitas pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta penerapan strategi *deep learning*. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, kebijakan, dan praktik pembelajaran, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma fungsionalisme Émile Durkheim telah diimplementasikan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) melalui berbagai aktivitas yang mendukung pembentukan karakter dan kesadaran sosial peserta didik. Fungsi sosialisasi nilai diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, toleransi, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan demokrasi yang diintegrasikan dalam diskusi kelas, studi kasus, refleksi pembelajaran, serta kegiatan proyek. Guru tidak hanya

berperan menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, fungsi integrasi sosial terlihat melalui kerja kelompok, musyawarah, diskusi kolaboratif, dan proyek sosial yang mendorong peserta didik belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, serta membangun solidaritas sosial. Pembelajaran PPKn juga berperan dalam pembentukan moral melalui pembiasaan sikap jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, dan bersikap demokratis. Sementara itu, fungsi pengendalian sosial diwujudkan melalui penerapan aturan kelas, kesepakatan belajar bersama, refleksi perilaku, serta penguatan budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi pembelajaran mendalam (*deep learning*) dalam pembelajaran PPKn tampak pada penerapan tiga karakteristik utama, yaitu *meaningful learning*, *mindful learning*, dan *joyful learning*. Guru menghubungkan materi pembelajaran dengan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti perundungan, toleransi, penggunaan media sosial, dan masalah lingkungan. Pendekatan ini membuat peserta didik lebih mudah memahami materi karena relevan dengan pengalaman mereka. Pembelajaran juga mendorong peserta didik berpikir kritis, merefleksikan pengalaman belajar,

mengemukakan pendapat, dan menganalisis berbagai permasalahan sosial. Selain itu, suasana belajar yang menyenangkan dibangun melalui diskusi kelompok, presentasi, simulasi demokrasi, debat, dan proyek sosial sehingga peserta didik lebih aktif, antusias, dan terlibat dalam proses pembelajaran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* memberikan kontribusi positif terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila. Peserta didik menunjukkan perkembangan dalam kemampuan bernalar kritis melalui analisis berbagai isu sosial dan kewarganegaraan. Sikap gotong royong berkembang melalui kegiatan kolaboratif dan proyek sosial, sementara kemandirian terlihat dari meningkatnya inisiatif belajar dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kreativitas peserta didik muncul melalui penyusunan proyek, kampanye digital, dan pencarian solusi terhadap permasalahan sosial. Selain itu, sikap menghargai keberagaman, toleransi, serta keterbukaan terhadap perbedaan semakin berkembang, sejalan dengan dimensi berkebinekaan global. Pembelajaran PPKn juga mendukung pembentukan karakter religius melalui penguatan sikap jujur, menghormati sesama, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan implementasi tersebut didukung oleh kompetensi guru yang memahami Kurikulum Merdeka dan strategi pembelajaran mendalam, dukungan kebijakan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta budaya sekolah yang menanamkan nilai disiplin, gotong royong, dan karakter positif. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa hambatan, antara lain perbedaan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis, keterbatasan waktu pembelajaran, tingginya beban administrasi guru, serta proses adaptasi sebagian guru terhadap perubahan paradigma pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

2. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn telah menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam teori fungsionalisme Durkheim. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media sosialisasi nilai, pembentukan moral, integrasi sosial, dan pengendalian sosial. Melalui proses tersebut, peserta didik dibentuk menjadi individu yang mampu memahami dan menjalankan peran sosialnya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara paradigma fungsionalisme Durkheim dan

pendekatan *deep learning*. Pembelajaran yang bermakna membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai sosial dan kewarganegaraan, pembelajaran berkesadaran memperkuat pemahaman terhadap tanggung jawab sosial, sedangkan pembelajaran yang menyenangkan mendorong terciptanya interaksi sosial yang positif dan solidaritas antarpeserta didik. Dengan demikian, *deep learning* menjadi pendekatan yang efektif dalam mengimplementasikan fungsi pendidikan menurut perspektif Durkheim.

Selain mendukung pengembangan kompetensi akademik, pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* terbukti berkontribusi terhadap penguatan enam dimensi Profil Pelajar Pancasila. Dimensi yang paling menonjol adalah kemampuan bernalar kritis, gotong royong, kemandirian, dan sikap berkebinekaan global. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa teori Durkheim masih relevan dalam pembentukan karakter, pendidikan moral, serta proses sosialisasi dan integrasi sosial di lingkungan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian mendukung konsep *deep learning* yang

menekankan pentingnya pembelajaran bermakna dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mengembangkan kompetensi abad ke-21. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan teori fungsionalisme Durkheim, pembelajaran PPKn, Kurikulum Merdeka, dan pendekatan *deep learning* dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosiologi pendidikan sekaligus menjadi referensi dalam penguatan praktik pembelajaran PPKn di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Paradigma Fungsionalisme Durkheim dalam Mata Pelajaran PPKn Kurikulum Merdeka Berbasis Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)*, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PPKn telah berhasil mengimplementasikan fungsi-fungsi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Émile Durkheim, yaitu sebagai sarana sosialisasi nilai, integrasi sosial, pembentukan moral, dan pengendalian sosial. Melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang kontekstual, reflektif, dan kolaboratif, peserta didik tidak hanya memperoleh

pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*) melalui pendekatan *meaningful learning*, *mindful learning*, dan *joyful learning* terbukti mampu memperkuat proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman nyata peserta didik memberikan ruang bagi mereka untuk berpikir kritis, melakukan refleksi, bekerja sama, serta memahami berbagai persoalan sosial secara lebih mendalam. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak lagi berorientasi pada hafalan konsep, tetapi menjadi sarana pembentukan karakter dan kesadaran sosial yang lebih bermakna.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* memberikan kontribusi positif terhadap penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dimensi bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, serta beriman dan berakhlak mulia berkembang melalui berbagai aktivitas

pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif peserta didik. Oleh karena itu, implementasi paradigma fungsionalisme Durkheim dalam pembelajaran PPKn dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang relevan dalam mendukung tujuan Kurikulum Merdeka untuk menghasilkan peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesadaran sosial yang kuat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi paradigma fungsionalisme Durkheim dengan pendekatan *deep learning* dalam pembelajaran PPKn merupakan model pembelajaran yang efektif untuk membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperan aktif, bertanggung jawab, serta berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru PPKn

Guru PPKn diharapkan terus mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penerapan pendekatan *deep learning*.

Pembelajaran hendaknya lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, berefleksi, memecahkan masalah, dan terlibat dalam kegiatan sosial yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan cara tersebut, nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dapat dipahami serta diterapkan secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Sekolah

Sekolah perlu memperkuat dukungan terhadap implementasi pembelajaran mendalam melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pengembangan budaya sekolah yang positif, serta peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan. Selain itu, sekolah perlu memperluas program yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kepemimpinan, dan penguatan karakter sebagai bagian dari implementasi Profil Pelajar Pancasila.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan diharapkan terus memperkuat program pendampingan, pelatihan, dan pengembangan profesional guru terkait implementasi Kurikulum

Merdeka dan pembelajaran mendalam. Kebijakan yang mendukung integrasi pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, dan pembelajaran berbasis pengalaman perlu terus dikembangkan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada konteks dan lokasi tertentu sehingga hasilnya belum dapat menggambarkan seluruh kondisi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jenjang pendidikan, wilayah, dan karakteristik sekolah yang lebih beragam. Selain itu, kajian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas pembelajaran mendalam dalam meningkatkan karakter peserta didik atau mengintegrasikan perspektif teori sosiologi pendidikan lainnya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai pengembangan pendidikan kewarganegaraan pada era Kurikulum Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. New York: Free Press, hlm. 70-79.
- Durkheim, E. (1973). *Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education*. New York: Free Press.
- Durkheim, E. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: Free Press, hlm. 52–60.
- Durkheim, E. (2014). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, hlm. 38-45, 84–129.
- Armianti, R., Bungana, R., & Setiawan, D. (2024). *Paradigma Baru Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar dalam Membentuk Karakter Siswa di Era Revolusi Industri 4.0*. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan.
- Ausubel, D. P. (2000). *The Acquisition and Retention of Knowledge*.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University*.
- DePorter, B., & Hernacki, M. (2016). *Quantum Learning*. Farhanah, N. A. (2024). *Paradigma Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia*. Mesada Journal.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep Learning: Engage the World Change the World*.
- Gea, J. H., Gulo, P., & Telaumbanua, A. T. P. (2025). *Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Hiliduho*. PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum.
- Gunawan, I. (2024). *Problematisasi Kurikulum Merdeka dalam Sudut Pandang Struktural Fungsional*. Jurnal Akademik Humaniora dan Edukasi.
- Isnawati, N., Rusydhikanza, N. A., Nurohmy, H., Putri, M. A., & Surayanah. (2025). *Analisis Implementasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Paradigma Kurikulum Merdeka di Kelas IV SDN Sentul 1*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran.
- Johnson, D. P. (2016). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka*.
- Kemendikdasmen. (2025). *Naskah Akademik Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)*.
- Langer, E. (1997). *The Power of Mindful Learning*.
- Musa, I. (2024). "Emile Durkheim's Theory of Social Facts on Moral and Character Education." *Journal of Research in Education and Society*, 5(2), 45–58.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Ritzer, G. (2018). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Sapriya. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice*.
- Tandi, S. (2019). "Educational Contribution of Emile Durkheim: A Functional Assessment." *International Journal of Sociology and Education*, 8(1), 67–82.
- Wahab, A.A., & Sapriya. (2021). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, hlm. 18.
- Winataputra, U. S. (2021). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.